

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* PADA SISTEM
PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III/16 MAKASSAR**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan Agama
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**RUSLAN
NIM. 10100116081**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan
NIM : 10100116081
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 26 Juni 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jln. Langsung, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa,
Kabupaten Bulukumba.
Judul : Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem
Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 17 Februari 2021 M.
5 Rajab 1442 H.

Penulis,


Ruslan
10100116081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA SISTEM PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR”, yang disusun oleh Ruslan, NIM: 10100116081, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 01 Februari 2020 M 19
Jumadil Akhir 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakri, Lc., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)

Munaqisy I : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. (.....)

Munaqisy II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. (.....)

Pembimbing II : Dr. Musyfikah Ilyas, S.Hi., M.Hi. (.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
NIP. 1973 122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan nikmat dan karuninya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam dihanturkan kepada nabi Muhammad saw, bersama seluruh keluarga dan para sahabatnya, semoga selalu tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Penulisan skripsi ini yang berjudul: “Penerapan Asas *Equality Before The Law* pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi tersebut mengalami banyak kesulitan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta do’a dan dukungan oleh kedua orang tua ayahanda Muh. Ramli serta ibunda Radiana, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menghanturkan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M. A. Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah mencurahkan perhatian dalam memajukan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd., selaku Dekan I, Dr. Marilang, SH, M.Hum., selaku Dekan II, serta Dr. Muhammad Saleh

Ridwan,. Selaku Dekan III Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Dr. Hj. Patimah, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Drs. Muhammad Jamal Jamil, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S., sekaligus pembimbing I dan Drs. Musfika Ilyas, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukannya selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., selaku penguji I dan Dr. Hj. Patimah, M.Ag., selaku penguji II. Kedua beliau yang telah memberikan banyak masukan serta petunjuk dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Jajaran dosen Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah membimbing dan memandu proses pembuatan skripsi ini maupun perkuliahan sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
8. Segenap structural dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum yang dalam hal ini tidak bisa penulis tuliskan namanya satu-persatu. Terkhusus staf Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu selama penulis menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

9. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literasi dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan fasilitas Perpustakaan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Pegawai Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.
11. Kepada Kakanda Asrudi, Rosmawati, Rasyid, Rasali, Rohayu dan adinda Risdawati, terima kasih atas do'a dan kasih sayang serta motivasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus kepada jurusan Peradilan Agama Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 tanpa terkecuali, yang selalu memberikan bantuan, serta motivasi untuk selalu berpacu dengan mereka, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman KKN Awal, Aso, Fahuwa, Reni, Indah, Tari, Rahma dan liana di Kelurahan Mario Rannu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, UIN Alauddin Makassar Angkatan 62, Terima kasih atas dukungannya dan pengalaman berharga saat berada di lokasi KKN.
14. Sahabat-sahabat di jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 kelas C tanpa terkecuali, yang selalu memberikan bantuan, serta motivasi untuk selalu berpacu dengan mereka, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terkhusus ucapan terima kasih kepada organisasi, pengurus, dan seluruh kader Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba (KKMB) yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penyusun.

Pada akhirnya, Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tak sempat disebutkan satu persatu. Penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah.

Makassar, 20 November 2020

Penulis,

Ruslan
Nim.10100116081



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Asas Equality Before The Law.....	12
B. Sistem Peradilan Militer.....	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Metode Pengumpulan data.....	25
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data.....	27
G. Pengujian Keabsahan Data.....	28

BAB IV PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA SISTEM	
PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III/16	
MAKASSAR	
A. Gambaran Umum PERADILAN MILITER III-16 Makassar.....	29
B. Konsep Asas Equality Before The Law dalam <i>Risalah AlQada Umar Bin Khattab</i>	37
B. Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer.....	44
C. Penanganan Perkara Pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit Berpangkat kapten dan Prada.....	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543b/U/1987. Terdapat sejumlah istilah dan kosakata yang berasal dari bahasa Arab dengan huruf hijai'yyah ditransliterasi kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tsa	S	es (dengan titi di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ba
د	da	D	de
ذ	dzal	Z	zet
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	T	te (dengan titi di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	N	em
ن	nun	N	en

و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf	Nama
أ... / آ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
إ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>Dhammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *maata*

قِيلَ : *qiila*

رَمَى : *ramaa*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhomah*. *ta marbutah* harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya [t]. *ta marbutah* harakat sukun, transliterasinya [h]. *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan [ha].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal* الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madiinah al-faadilah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

(ئ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. (ئ) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ئ), ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa* الْحَقُّ : *al-haqq*
نَجَّيْنَا : *najjainaa*

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

7. *Hamzah*

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna* النَّوْعُ : *al-nau'*



ABSTRAK

NAMA : Ruslan
NIM : 10100116081
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam
JUDUL SKRIPSI : “Penerapan Asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III-16 Makassar”.

Penelitian ini membahas prinsip *Equality Before The Law* yaitu menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat pengistimewaan dalam bidang peradilan. Bertitik tolak pada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 Tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimana mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili pada badan peradilan umum, yang dimana berbeda dengan yuridiksi Pengadilan Militer Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengamanatkan bahwa anggota militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Pengadilan Militer. Serta pengadilan militer merupakan badan peradilan yang memberikan keistimewaan kepada anggota militer.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* Pada Sistem Peradilan Militer di pengadilan militer III-16 Makassar, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis dan Sosiologi dengan sumber data dari Peradilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa asas *Equality Before The Law* (EBL) tidak dapat ditegakkan selama badan peradilan militer belum merevisi Undang-Undang Materil maupun Formilnya yang dimana Prajurit Militer direvisi menjadi subyek umum, sehingga mampu dimintai pertanggung jawabannya di muka pengadilan umum dalam hal perkara tindak pidana umum. Bahwanya konsep dari EBL ini telah lama dikenal islam jauh sebelum munculnya di dunia barat. Islam Mengenal konsep EBL melalui Risalah AlQada Umar Bin Khattab yaitu pada abad ke-6M, Sedangkan dunia barat baru mengenal EBL pada abad Ke-11M.

Kata Kunci : *Equality Before The Law*, Peradilan Militer, Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah '*the rule of law, not of man*'. yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), undang-undang, peraturan pemerintah hingga berbagai peraturan teknis pelaksanaannya. untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang berfungsi sebagai '*the quardian*' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*'.¹

¹Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa* (Cet. II;Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 37.

Konsep Negara Hukum di Eropa continental yang dikembangkan oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan dan dipelopori oleh A.V.Dicey dengan sebutan "*the Rule Of Law*".²

Menurut Sthal, unsur-unsur yang menjadi ciri negara hukum (*rechstaat*) ialah adanya perlindungan hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Wilayah Anglosakson atau AngloAmerika, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang di pelopori oleh A.V.Dicey, yang unsur-unsurnya didalam konsep negara hukum itu ditandai dengan adanya supremasi hukum atau supremasi aturan-aturan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya dapat di hukum apabila melanggar hukum. adanya kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, bahwa tidak ada perbedaan terhadap seseorang baik orang biasa maupun pejabat dan prajurit. dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.³

Keempat prinsip '*rechtsstaat*' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*rule of law*' yang dikembangkan oleh A.V.Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara hukum Modern dizaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commision of Jurist*", prinsip-prinsip Negara hukum itu ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan

²Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h. 38.

³Ridwan HR, *hukum administrasi Negara* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 3.

tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang masih dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap Negara Demokrasi.⁴

Kekuasaan kehakiman adalah prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. kekuasaan ini merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi yang ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah *judicial*, *judiciary*, atau *judicature*.⁵

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peratur perundang-undangan dan salah satu diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UUKK).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum yang baik.⁶

Dalam sistem Negara modern, kekuasaan kehakiman ini merupakan bidang yang diorganisasikan secara tersendiri, terpisah dari kekuasaan Negara lainnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Karena itu, sampai sekarang, prinsip *independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap Negara hukum. Menurut Mukti Arto, keberadaan lembaga pengadilan sangat penting karena tiga alasan : (1) pengadilan merupakan pengawal konstitusi; (2)

⁴Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h. 38.

⁵ Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h. 35.

⁶Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Cet. I; Makassar: Arus Timur, 2012), h. 2.

pengadilan bebas merupakan unsur negara demokrasi; (3) pengadilan merupakan akar Negara hukum.⁷

Peradilan merupakan kebutuhan fundamental dalam masyarakat dan Negara, suatu pemerintahan tidak akan stabil tanpa penyelenggaraan peradilan yang baik. peradilan adalah salah satu pilar utama dalam system pemerintahan, ia adalah institusi yang diakui dan dibutuhkan oleh seluruh bangsa karena melalui peradilan ditegakkan *amar makruf nahi mungkar*, menyampaikan hak kepada yang berhak, menghalangi orang berbuat aniaya, mewujudkan berbagai kebaikan dan kemaslahatan umum.

Menyelenggarakan peradilan yang baik adalah salah satu tugas pokok penguasa atau kepala negara dalam mewujudkan tujuan dan fungsi negara. peradilan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak, dan memelihara kehormatan, jiwa dan harta benda masyarakat.⁸

Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang diberikan wewenang oleh UUD Negara RI tahun 1945 sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dan benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia. dulu dikenal pengadilan *Hooggerrechtshoof*, berkedudukan di Jakarta dengan daerah hukum meliputi seluruh Indonesia.⁹

Sejak ditetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang; “ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman” pada tanggal 17 Desember Tahun 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 juga telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditetapkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan

⁷Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h. 35.

⁸Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, h. 1.

⁹Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h.63.

tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan-pengadilan yang berada dibawahnya yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri dari:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰

Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum guna menciptakan kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera adalah melalui peradilan militer yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. sementara itu undang-undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer meliputi

¹⁰Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h. 93.

Pengadilan Militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran, berpuncak pada Mahkamah Agung.¹¹

Era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak, berimbas kepada penyelenggaraan peradilan. prinsip *equality before the law* menghendaki tidak ada warga negara yang mendapat hak istimewa apalagi dalam bidang peradilan. oleh karena itu tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus bergaung dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum dibawah ke pengadilan sipil. Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.¹²

Semangat yang terkandung dalam TAP MPR RI dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan usul inisiatif perubahan undang-undang Nomor 34 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan supaya terjadi sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh komponen sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti tidak merujuk kepada satu sistem peradilan pidana (baik peradilan umum maupun

¹¹ Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, h.94.

¹² Muhammad ishar helmi, *Penerapan Asas Similia Similibus pada peradilan militer*, jurnal (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013) , h.5. Diakses Pada Tanggal 4 november 2019.

peradilan militer). Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu.

TAP MPR RI Nomor VII/2000 Khususnya pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: “prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum, kemudian RUU perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”¹³

Peradilan militer di Indonesia dalam gambaran Undang-undang nomor 31 tahun 1997 sangat memungkinkan kontrol oleh Panglima TNI. Dalam nuansa militeristik, unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor penting dan mempengaruhi proses peradilan. Sebagai contoh dalam hal pemecatan hakim peradilan militer, sebagaimana alasan-alasannya diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1997 pasal 25.

Hakim tersebut dapat melakukan pembelaan di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 25 ayat 2), sementara pembentukan Majelis Kehormatan tersebut ditetapkan oleh Panglima TNI (Pasal 25 ayat 3 jo Pasal 1). Selain itu dominasi panglima juga terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan Militer (pasal 29) melalui keputusan panglima. Selain itu perlu diingat bahwa status hakim dalam pengadilan militer adalah militer aktif sehingga akan terjadi kekacauan administrasi terhadap seseorang yang menjadi hakim dalam peradilan militer karena harus tunduk pada 2 institusi yakni institusi kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan Institusi TNI.

Panglima TNI juga aktif menentukan keberlanjutan sebuah perkara. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai Papera. Posisi ini sangat dominan

¹³Muhammad ishar helmi, *Penerapan Asas Similia Similibus pada peradilan militer*, jurnal (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013) , h.5. Diakses Pada Tanggal 4 november 2019.

untuk menentukan proses peradilan (Pasal 1 angka 10 jo 123). Salah satu alasan yang bisa digunakan oleh Papera untuk menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan ini bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Disisi lain, akibat adanya Papera mengakibatkan bertambah panjangnya proses yang harus dilalui agar suatu perkara dapat disidangkan di pengadilan. Hal ini dapat disebabkan kinerja subyektifitas Papera dan juga proses yang harus dilalui apabila ada perbedaan pendapat antara oditur militer dengan Papera dalam mengeluarkan surat keputusan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi peneliti mengangkat judul **“PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* PADA SISTEM PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III/16 MAKASSAR”**.

B. Penelitian

1. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, peneliti memberikan batasan dan cakupan penelitian baik dari segi rentang waktu maupun jangkauan wilayah obyek penelitian yang terkait judul “Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III/16 Makassar”. Oleh karena itu, Penelitian ini terfokus pada Pengadilan militer III/16 Makassar.

2. Deskripsi Fokus

¹⁴Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia*, Jurnal, h. 54. Diakses Pada Tanggal 15 November 2019.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman maka penelitian memberikan definisi mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni “Penerapan Asas *Equality Before The Law* pada Sistem Peradilan Militer Di Pengadilan Militer III/16 Makassar?”

1. Penerapan Asas *Equality Before Of The Law* Adalah persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.¹⁵
2. Sistem adalah kata serapan dari bahasa Inggris (*system*), yakni perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
3. Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.¹⁶
4. Pengadilan Militer III/16 Makassar adalah sebuah badan peradilan militer yang menangani perkara pidana militer prajurit berpangkat prada hingga kapten pada tingkat pertama.

Berdasarkan deskripsi fokus penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Militer III/16 Makassar melalui wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Militer III/16 Makassar kemudian mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

¹⁵Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia berketuhanan yang maha esa*, h. 48.

¹⁶Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia berketuhanan yang maha esa*, h. 94.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana Penerapan Asas Equality Before The Law pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III/16 Makassar?*

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut

1. Bagaimana konsep asas *Equality Before The Law* dalam *Risalah Al-Qada Umar Bin Khattab*?
2. Bagaimana penerapan asas *Equality Before The Law* pada sistem peradilan militer?
3. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten dan Prajurit berpangkat Prada dengan menerapkan Asas *Equality Before The Law*?

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran literasi-literasi yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian, yang diperoleh dari beberapa penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul penerapan asas *Equality Before The Law* diantaranya:

1. Kaitannya dengan buku-buku
 - a. Abd. Halim Talli dalam bukunya yang berjudul *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*, pada tahun 2016. Buku ini menjelaskan mengenai sistem peradilan di Indonesia

- b. Abd. Halim Talli dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Alqada*, pada tahun 2014. Buku ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pada zaman Umar Bin Khattab
- c. Ridwan HR dalam Bukunya *Hukum Administrasi Negara*, pada tahun 2016. Buku ini menjelaskan mengenai ruang lingkup kajian hukum administrasi negara.
- d. Sukarno Aburaera dalam bukunya *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, pada tahun 2012. Buku ini menjelaskan mengenai sejarah dan sistem kekuasaan kehakiman diindonesia.

2. Kaitannya dengan jurnal

- a. Muhammad Ishar Helmi dalam jurnalnya yang berjudul *Penerapan Asas Similiar Similius pada Peradilan Militer*, pada tahun 2013 yang membahas tentang bagaimana penerapan asas persamaan dihadapan hukum dalam lingkup pengadilan militer.
- b. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan dalam Jurnalnya yang berjudul *Menerobos Jalan Buntu Kajian terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia*, Pada Tahun 2009 yang membahas mengenai sistem peradilan militer pasca reformasi tahun 1998.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum skripsi merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai satu kewajiban secara formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut, adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, Maka tujuan yakni bertitik tolak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas *Equality Before The Law* pada sistem peradilan militer di pengadilan militer III/16 Makassar.
- b. Untuk mengetahui penanganan perkara pidana prajurit yang berpangkat kolonel dan prada dengan menerapkan Asas *Equality Before The Law*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah, maka kegunaan umum dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan serta memahami mengenai bentuk dan penerapan asas *Equality Before The Law* terhadap sistem peradilan militer. Sedangkan kegunaan Khusus dari penelitian yang dilakukan yakni:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang berguna bagi penulis khususnya kemudian menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum pidana khususnya bidang ilmu pidana militer

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih kepada lembaga peradilan pada umumnya dan bagi akademisi pada khususnya guna mengetahui sistem hukum di Indonesia terutama di dalam ruang lingkup Peradilan Militer, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menuju profesionalisme sebagai calon sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Asas Equality Before The Law*

Asas Equality Before The Law atau asas persamaan dalam hukum adalah persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam konsep persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang. Kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan “*affirmative action*” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih jauh.

Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus “*affirmative action*” yang termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, Misalnya kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.¹⁷

Asas Equality Before The Law merupakan asas yang penting dalam penyelenggaraan peradilan. Arti dari asas tersebut ialah semua orang yang berperkara di dalam persidangan sama hak dan kedudukannya, asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan kedudukan ataupun perilaku terhadap pihak

¹⁷Abd Halim Talli, *Peradilan Indonesia berketuhanan yang maha esa*, h. 48.

berperkara baik secara diskriminatif secara normatif maupun kategoris dari hakim atau dari pejabat peradilan lainnya.¹⁸

Equality Before The Law adalah konsep yang sangat universal dan tekstual bagi hukum. Secara universal *Equality Before The Law* sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang. Sedangkan tekstual, *Equality Before The Law* tertulis dalam dokumen hukum yang induk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya, dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya hanya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum. Jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep hukum.

Equality Before The Law merupakan salah satu konsep untuk melawan diskriminasi, setiap negara atau otoritas harus berdasarkan kekuasaan dan pengaturannya berdasarkan pada hukum. Bagi Indonesia, Hal ini bisa dilihat dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hukum tersebut harus berlaku bagi setiap orang bukan sekedar warga negara. Pasal 28D UUD 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁹

Sedangkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari kedua pasal diatas dapat, bisa digambarkan bahwa ada perlakuan yang seharusnya sama baik setiap orang maupun setiap warga negara. Perbedaanya, pada pasal 27 ayat 1

¹⁸Hariyanto, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta; Mahameru Press, 2017), h. 50.

¹⁹Haris Azhar, *hukum dan Ham, Kuliah umum* (Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, 2018), Diakses pada tanggal 15 November 2019.

berada dalam bab Warga Negara dan Penduduk. Sementara pasal 28D berada pada bab Hak Asasi Manusia. Artinya, kesetaraan dimata hukum adalah sesuatu yang mendasar baik untuk tanggung jawab negara terhadap setiap orang yang berada di Indonesia atau bahkan dalam konteks global dan warga negaranya.

Turunan konstitusi dalam hukum atas kepastian *Equality Before The Law*, bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan ‘pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang’. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan badan peradilan yang berada dibawahnya seperti peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara, termasuk pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, seperti peradilan HAM, pengadilan anak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan niaga (pasal 18, pasal 25, dan pasal 27). Selain Mahkamah Agung, juga secara sejajar kekuasaan kehakiman berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian sudah jelas bahwa peradilan di Indonesia dalam hal ini melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi menegakan tugas menjamin persamaan setiap orang dimuka hukum (*Equality Before The Law*).²⁰

Asas persamaan dihadapan hukum (*Equality Before The Law*) merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum dijadikan sebagai standar dalam mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok-kelompok minoritas. Namun sisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan,

²⁰Haris Azhar, *hukum dan Ham, Kuliah umum* (Jakarta, Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, 2018), Diakses pada tanggal 15 November 2019.

modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi asset dan kekuasaannya.

Asas *Equality Before The Law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal, ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal didalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan persamaan antara didalam wilayah hukum, wilayah sosial, dan wilayah ekonomi itulah yang menyadikan Asas *Equality Before The Law* tergerus ditengah dinamika sosial.²¹

Pada realitanya hukum di Indonesia tidak sepi akan istilah *Equality Before The Law* (persamaan di depan hukum). baik itu dari para petani, buruh/pekerja, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan. Maupun dari kelompok yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalagunaan kekuasaan. walaupun kedua kelompok ini berbeda kepentingannya. Tetapi dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak.

Istilah tersebut sangat sederhana, tetapi perlu ditelaah secara kritis. Karena penerapan Asas *Equality Before The Law*, tergantung dari paradigma subyek hukum tersendiri. Diturunkan menjadi teori hukum yang dianut oleh para ilmiator. Selain itu juga, yang paling penting adalah aparatur hukum didalam penegakannya. Prespektif aparat penegak hukum dalam perannya dapat dilihat dari; *pertama*; Terdakwa/Penasehat hukum, pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

²¹Julita Melisa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal (Jakarta, Akademika Pressindo, 2013), diakses pada tanggal 15 november 2019.

kedua; jaksa penuntut umum, pandangan subyektif dari posisi obyektif (mewakili kepentingan negara /masyarakat).

ketiga; Hakim, Pandangan obyektif dari posisi yang obyektif. Bagaimanapun aparaturnya mempunyai perspektif tersendiri didalam interpretasi terhadap Asas didalam perkara yang dikerjakan. Tetapi perlu kiranya, sebagai Negara yang berdaulat, untuk memahami asas hukum dalam konteks tujuan negara.²²

B. Sistem Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama , dan pengadilan militer pertempuran, berpuncak pada Mahkamah Agung. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menetapkan bahwa pengadilan militer utama berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi bertempat, berkedudukan, dan daerah hukumnya ditetapkan dengan keputusan Panglima. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Hakim pada peradilan militer meliputi Hakim Militer, Hakim Militer Tinggi, Hakim Militer Utama, yang masing-masing adalah pejabat melaksanakan Kekuasaan Kehakiman pada pengadilan. Hakim Ketua adalah Hakim yang

²²Muhammad ishar helmi, *Penerapan Asas Similia Similibus pada peradilan militer*, jurnal (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013) , h.7. Diakses Pada Tanggal 4 november 2019.

megetuai majelis hakim dalam persidangan pengadilan, dan Hakim Anggota adalah Hakim yang menjadi anggota majelis hakim di persidangan pengadilan.²³

Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jabatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
3. menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam suatu putusan.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, susunan persidangan sebagai berikut:

- a. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim

²³Abd.Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Maha Esa*,(Cet.II;Makassar: Alauddin University Press,2016), h. 94.

²⁴Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia* ,(Cet.I;Makassar:Arus Timur,2012), h. 35.

Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang panitera.

- b. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang panitera.
- c. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang panitera.
- d. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang panitera.
- e. Pengadilan Militer Pertempuran Bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang panitera.

Memperhatikan susunan persidangan pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditetapkan adanya oditur militer/ oditur militer tinggi pada persidangan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran. Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi, disebut oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagaimana pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebaga penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesi, disebut Oditur Jenderal adalah Penuntut Umum ter-tinggi dilingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penangung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Oditurat adalah badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.²⁵

Undang-Undang mengenai peradilan militer yang masih digunakan sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang ini mengatur mengenai proses hukum acara pidana dan hukum acara gugatan Tata Usaha Negar (TUN) terhadap seseorang atau lebih anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum pidana ataupun menimbulkan sengketa keputusan militer.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Ruang lingkup Peradilan Militer meliputi sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer : Pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten ke bawah dan pihak lain yang masuk *justiabel* peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (penentuan tingkat kepangkatan ini ditetntukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman).
2. Pengadilan Militer Tinggi :
 - a. Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan militer.

²⁵Abd.Halim Talli, *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Maha Esa*, h. 95.

- b. Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor ke atas atau pihak lain yang termasuk tingkat kepangkatan mayor ke atas.
- c. Mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya.

3. Pengadilan Militer Utama

- a. Pengadilan tingkat banding untuk perkara yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi.
- b. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer yang daerah hukumnya di bawah pengadilan militer tinggi yang berbeda, antara pengadilan militer tinggi dan antara pengadilan militer tinggi dengan pengadilan militer.
- c. memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- d. meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, Peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung .
- e. Pengawasan terhadap: penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer pertempuran di daerah hukumnya masing-masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

- 4. Pengadilan Militer Pertempuran : tingkat pertama dan terakhir di daerah pertempuran. karenanya, daerah hukumnya berada di daerah pertempuran tergantung dari perpindahan pasukan.

Ada pula Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam sistem peradilan militer, Ankum adalah atasan dari prajurit yang akan dihukum yang

fungsinya adalah sebagai penyidik. Walaupun Ankum bukan satu-satunya penyidik yaitu dapat juga dilakukan oleh polisi militer dan oditur militer serta dapat dibantu penyidik pembantu (provost di tiap-tiap angkatan), tetapi kewenangan Ankumlah yang paling besar. Hal ini ditunjukkan dari perintah penahanan hanya berasal dari Ankum dan hasil penyidikan harus dilaporkan kepada Ankum.

Lalu Papera atau Perwira Penyerah Perkarah, penyerahan perkara ini berarti suatu perkara dapat diserahkan ke pengadilan untuk diadili, atau diselesaikan untuk diadili, ataupun ditutup demi kepentingan hukum/umum/militer. Yang memiliki kewenangan penyerah perkara adalah Panglima, Kepala Staf TNI dan yang ditunjuk komandan atau kepala kesatuan dengan syarat komandan korem. Khusus untuk menutup perkara hanya dapat dilakukan oleh Panglima.²⁶



²⁶Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rinam Antartika cv,2009), h. 48. diakses pada tanggal 15 November 2019.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.²⁷ Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.²⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah *Case and Field Research*. Penelitian studi kasus dan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subyek tertentu. Studi kasus atau *Case Study* merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu kasus, gejala social, atau unit sosial tertentu yang spesifik. Kasus dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah konsep, aktivitas, waktu, benda (hasil karya seseorang), kebijakan, kelas sosial, organisasi, negara, wilayah, atau fenomena lain yang spesifik.

Penelitian studi kasus memfokuskan diri untuk menggambarkan kasus tersebut dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan baru. Studi kasus merupakan sebuah upaya pencarian pengetahuan secara *empiris* dengan

²⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

²⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 5.

cara menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Tujuannya untuk memberikan analisis konteks dan proses yang menerangi isu-isu *teoretis* yang dipelajari. Studi kasus merupakan bagian penelitian kualitatif yang berupaya melibatkan dan melaporkan kompleksitas kegiatan sosial.²⁹

Penelitian kualitatif merupakan suatu *strategi inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.³⁰

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam proposal ini berada di Pengadilan Militer III/16 Makassar. Penelitian memilih lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi penelitian karena untuk memahami lebih lanjut terkait judul penelitian haruslah dilakukan lebih lanjut di pengadilan militer itu tersendiri.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian tersebut menggunakan beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan dengan menganalisa suatu masalah terhadap pasal-pasal dalam undang-undangan.

²⁹Sudaryono, *Metode Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 88.

³⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 328.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada metode ini tidak hanya melihat perilaku manusia dari yang nampak saja, tetapi secara *eksplisit dan implisit*.³¹

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian tersebut, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait. Data ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang ada serta relevan dengan masalah.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan yang bersifat mengikat seperti al-Qur'an, hadist dan fatwa ulama serta data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian alam yang ada

³¹Faisar Ananda, Dkk, *Metode Studi Islam*, (Cet, I; Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 155.

di sekitarnya), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.³²

Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak yang berada pada lingkup Pengadilan Militer III/16 Makassar yang menjalankan proses hukum dan juga melihat data yang ada dilapangan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menumpulkan data penelitian bahkan wawancara (*interview*) ini adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³³ Dalam penelitian ini yang dijadikan terwawancara adalah Hakim serta oditur yang berada pada lingkup Peradilan Militer III/16 Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu baik dalam bentuk teks tertulis, gambar maupun foto.³⁴ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto dan lain-lainnya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Pada metode ini penulis akan mengambil dokumentasi di Pengadilan Militer III/16 Makassar.

³²Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 87.

³³Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 372.

³⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 391.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah penelitian itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mencapai tujuan pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan.

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Teknik Pengelohan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari lapangan kemudian dereduksi, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu di dekskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian, pada analisis data ini dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian.

Menurut Fossey, bahwa analisis data kualitatif merupakan proses *mereview* dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga dapat menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti.³⁵

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dengan dua cara yakni

1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.
2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contohnya, data hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

³⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 400.

BAB IV

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW PADA SISTEM PERADILAN MILITER DI PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Makassar

Kota Makassar merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian selatan pulau Sulawesi yang lebih dikenal dengan Ujung Pandang, terletak diantara 119°24'17'38'' Bujur Timur dan 5°8'6'19'' Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang), Kota Makassar tercatat memiliki luas wilayah 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dan memiliki suhu rata-rata berkisar diantara 26°C hingga 29°C.

Kota Makassar merupakan wilayah yang terletak dekat dengan pantai yang terbentang dari sepanjang koridor barat dan utara dan dikenal dengan *WaterFront City* yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, Sungai Pampang) yang semuanya bermuara kewilayah dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada ditinggikan 0-25 meter diatas permukaan laut, dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami musibah banjir pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan disertai dengan naiknya permukaan air laut.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 wilayah kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso,

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

Batas-Batas administrasi Kota Makassar adalah:

- Batas Utara : Kabupaten Maros
- Batas Timur : Kabupaten Maros
- Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Batas Barat : Selat Makassar

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagian Barat ke Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai
- b. Bagian Timur ke Selatan memiliki topografi berbukit seperti diwilayah Kelurahan Antang dan Kecamatan Panakukang.

Secara Demografis, Kota Makassar Merupakan kota yang tergolong tipe multi etnik atau multi kultur yang beragam suku bangsa yang menetap didalamnya, diantaranya yang signifikan ialah Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar.³⁶



³⁶<https://Makassarkota.go.id/geografis/> Diakses pada tanggal 09 Juli 2020.

2. Pengadilan Militer III-16 Makassar



a. Sejarah Peradilan Militer III-16 Makassar

Pada mulanya Pengadilan Militer III-16 Makassar bernama Mahkamah Militer III-16 Makassar yang berdiri pada 3 juni 1982 dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI pada saat itu, Mayjen (TNI) E. Y. Kanter, S. H. berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang tahun 1988 yang kian memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer.

Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fuungsi kekuasaan Lembaga Peradilan dan Peradilan Militer III-16 Makassar, dimana yang pada mulanya Peradilan Militer atau yang lebih dikenal dahulu dengan Mahkamah Militer yang pada mulanya berada dibawah kekuasaan TNI kemudian berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengakibatkan peralihan “Organisasi, administrasi dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Prngadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung”. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Dengan terjadinya pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi dan finansial Lembaga Peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersebut, maka pembinaan Bidang Teknis Yudikatif dan Non Teknis Yudisial Lembaga Peradilan kini berada satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Berikut daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar:

1. Kolonel Chk Siswandi, S.H
2. Kolonel Laut (KH) Hasan Basri, S.H
3. Brigjen TNI W.K, warsito, S.H
4. Brigjen TNI Karjono Yudho, S.H
5. Kolonel Laut (KH) Suharso, S.H
6. Kolonel Chk Skrawata, S.H
7. Kolonel Chk Sumarso, S.H
8. kolonel Laut (HK) IGN Pandu Suganda, S.H
9. Kolonel Chk Soewandi JS, S.H
10. Kolonel Chk Tusio Aknusaputra, S.H
11. Kolonel Chk M.Panjaitan, S.H

12. Kolonel Chk L.H. Muldi, S.H
13. Kolonel Chk (K) Reflina Nurman, S.H
14. Kolonel Laut (KH) A.R Tompubolon, S.H.,M.H.
15. Kolonel Chk Sunardi, S.H
16. Kolonel Chk Djodi, S.H
17. Kolonel Laut (KH) M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum
18. Kolonel Chk Deddy Suryanto, S.H., M.H.
19. Letkol Chk Moch. Afandi, S.H.

b. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-16 Makassar

Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Militer III-16 Makassar adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Militer III-16 Makassar Yang Agung.

Misi:

Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-16 Makassar, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-16 Makassar, meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-16 Makassar.

c. Wilayah Yuridiksi

Adapun Peta Yuridiksi Pengadilan Militer III-16 Makassar meliputi beberapa Provinsi dan Satuan, yaitu:



1. Provinsi Sulawesi Selatan
2. Provinsi Sulawesi Barat
3. Provinsi Sulawesi Tenggara
 - a. Jajaran Kodam Terdiri Dari:
 1. Kodim 1408/BS
 2. Yonif 700/Raider
 3. Yon Kavaleri 10/Serbu
 4. Yon Armed 6-76 Tarik Tamarunang
 5. Yon Zipur 8 SMG
 6. Rai Arhanudri 141/BS
 - b. Korem 141/TP:
 1. Denpom VII/3
 2. Kodim 1406/Wajo
 3. Kodim 1407/Bone
 4. Kodim 1409/Gowa
 5. Kodim 1410/Bantaeng
 6. Kodim 1411/Bulukumba
 7. Kodim 1415/Selayar
 8. Kodim 1422/Maros
 9. Kodim 1423/Soppeng
 10. Kodim 1424/Sinjai
 11. Kodim 1425/Jeneponto
 12. Kodim 1426/Takalar
 13. Yonif 726/Tml
 - c. Korem 142/TTG:
 1. Denpom VII/4

- 
- 2. Kodim 1401/Majene
 - 3. Kodim 1402/Polmas
 - 4. Kodim 1403/Sawerigading
 - 5. Kodim 1404/Pinrang
 - 6. Kodim 1405/Mlts
 - 7. Kodim 1414/Tator
 - 8. Kodim 1418/Mamuju
 - 9. Kodim 1420/Sidrap
 - 10. Kodim 1421/Pangkep
 - 11. Yonif 721/Mks
 - d. Korem 143/HO:
 - 1. Denpom VII/5
 - 2. Kodim 1412/Kolaka
 - 3. Kodim 1413/Bau-Bau
 - 4. Kodim 1416/Raha
 - 5. Kodim 1417/Kendari
 - 6. Yonif 725/Wrg
 - e. Brigade:
 - 1. Brigif Linud 3/Ths
 - 2. Yonif 431/SSP
 - 3. Yonif 432/WJS
 - 4. Yonif 433/JS
 - f. Jajaran TNI AL
 - 1. Lantamal VI
 - 2. Lanal Kendari
 - g. Jajaran TNI AU

1. Koops AU II
2. Lanud Hasanuddin
3. Lanud Wolter Monginsidi
4. Paskhas 466

h. Mabes TNI

1. Konsekhanudnas II Makassar
2. Pengadilan Militer III-16 Makassar
3. Oditur Militer III-16 Makassar
4. Masmil

d. Tugas dan Fungsi Peradilan Militer III-16 Makassar

Pengadilan Militer III-16 Makassar memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI aktif, dimana terdakwaanya berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer dibatasi dengan hanya memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dengan pangkat Kapten ke bawah, hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang oleh Undang-Undang dibatasi dengan kepangkatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer III-16 Makassar Memiliki Fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan para pencari keadilan pada tingkat pertama,
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang Teknologi Informasi, kepada semua unsur pejabat maupun staff di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
4. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang keadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.³⁷

B. Asas Equality Before The Law Dalam Risalah Al-Qada Umar Bin Khattab

Islam merupakan agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw mengajarkan kepercayaan kepada tauhid yaitu kepercayaan kepada Allah yang merupakan Tuhan yang maha Esa. Ada dua hal yang membedakan antara agama islam dengan agama lainnya, yaitu islam mengajarkan tentang tauhid, sedangkan agama yang lain mengajarkan aqidah non tauhid. Kemudian dalam islam ada syariat yang merupakan pedoman sebagai tatanan hidup dan cara beribadah umat manusia, sedangkan agama yang lain tidak memiliki hal tersebut.³⁸

Syariat islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad saw merupakan hukum yang sudah ditetapkan secara rinci ataupun masih pada pokok-pokoknya saja. Hukum Islam yang merupakan hukum dari ilahi atau yang dipercaya oleh umat islam sebagai sang pencipta kehidupan yang ada didunia dan di akhirat (tuhan) adalah aturan-aturan yang diambil dari wahyu ilahi yang kemudian dirumuskan menjadi produk hukum berupa fiqh, fatwa, putusan pengadilan ataupun juga Undang-Undang yang dijadikan pedoman bagi umat islam.

³⁷www.dilmil-makassar.go.id Diakses pada tanggal 09 Juli 2020.

³⁸Mukti Arto, Penemuan hukum islam demi mewujudkan keadilan “penerapan penemuan hukum, Ultra petita dan Ex Officio hakim secara proporsional”, (cet II, Yogyakarta;pusaka pelajar, 2018), hlm. 1.

Hukum islam merupakan hukum yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. dengan demikian sumber utama hukum islam ialah AlQur'an dan Assunnah atau Hadis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sumber hukum islam yang lainnya yang merupakan turunan atau juga penjelasan dari AlQur'an dan Hadis yaitu Ijtihad,Ijma,Qiyas,Pendapat Para Sahabat, dan Tradisi (adat).³⁹

Hukum islam mengatur berbagai hal mengenai kehidupan manusia terutama hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. persamaan dalam hukum atau *Equality Before The Law* merupakan hal yang sangat penting di dalam hukum islam yang lebih spesifik dalam hukum pidana islam. Menurut Hariyanto, salah satu prinsip dalam islam adalah persamaan manusia, yang mana manusia sama dihadapan Allah, tidak ada satupun golongan, suku, ataupun ras yang lebih unggul dari yang lainnya, karena semua manusia hakikatnya berasal dari leluhur yang sama.⁴⁰

Asas *Equality Before The Law* dapat dimaknai sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materiil yang sama. Kemudian persamaan hak pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan dihadapan hakim dan pengadilan berdasarkan hukum formil. Dengan adanya Asas *Equality Beforw The Law* menegakkan hak asasi setiap orang yang berperkara dipengadilan. Dapat dilihat bahwa asas *Equality Beforw The Law* mengeluarkan suatu produk yang dinamakan keadilan.

³⁹Mardani, *hukum islam pengantar ilmu hukum islam di Indonesia*, (cet.I,Jakarta;pustaka pelajar, 2015), hlm. 14.

⁴⁰Hariyanto, *Hak asasi manusia dan hukum pidana islam*, (Cet.I, Yogyakarta;Mahameru Press,2017), hlm. 50.

Dalam AlQur'an yang merupakan sumber utama dari hukum islam banyak ayat yang menegaskan tentang persamaan yang kemudian menghasilkan output yaitu Keadilan, diantaranya adalah :

1. Q.S An-nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menciptakan semua manusia pada hakikatnya adalah sama yaitu semuanya diciptakan dari hal yang sama dan tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

2. Q.S Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya

Wahai manusia! sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memang menciptakan manusia baik itu dari perempuan maupun laki-laki yang kesemuanya terdiri dari bangsa-bangsa dan suku-suku, selain itu bahkan perbedaan warna kulitpun merupakan ciptaan Allah, tidak ada yang membedakannya di dunia kecuali ketakwaanya. Jadi dapat

dilihat dengan jelas bahwa adanya persamaan bagi setiap orang tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi kepada seseorang, sekelompok, ataupun segolongan manusia untuk mencari keadilan dimuka persidangan. Hakim ataupun pejabat pengadilan tidak boleh membedakan atau mendiskriminasi para pencari keadilan karena memang semua orang yang ada itu ciptaan Allah yang sama dan sederajat sesuai dengan ayat diatas.

Sejarah membuktikan bahwa peradilan telah ada dan dikenal sejak masa silam, yang berlaku terhadap semua bangsa yang ada didunia ini, karena ia merupakan tugas suci yang dapat menegakkan keadilan, mencegah kezhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, menyuruh ma'ruf dan mencegah kemungkaran, serta menegakkahn *ishlah* diantara umat manusia.

Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan islam itu sendiri. Bila ditelusuri sejarah perkembangan peradilan dalam islam, maka terlihat adanya masa dinasti Khalifah Umar Bin Khattab yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam islam, dimana masa itu islam telah meluas hingga semenanjung Arabia, yang dapat membuat bertambahnya tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya, yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya. Peraturan baru ini dikenal dengan *Risalah Al-Qadha* yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya.

Risalah Al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan intruksi Umar Bin Khattab kepada para hakimnya, khususnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang mestinya dilakukan oleh

seorang hakim. Risalah ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan dijadikan rujukan sebagai sumber hukum dibidang peradilan oleh kaum muslimin.⁴¹

Sebagai petunjuk dan pedoman umum penyelenggaraan peradilan, risalah tersebut memuat sebelas prinsip yang salah satunya ialah mempersamakan perlakuan para pihak, baik dalam majelis, menghadap kepadanya, dan dalam peradilan.

أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ, حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ,
وَلَا يَيْئَسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ.

Artinya

Samakanlah para pihak di majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, supaya orang mulia tidak tamak kecuranganmu, dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. (HR. ad Daarquuthni).⁴²

Persamaan antara pihak yang berselisih, adalah salah satu tugas utama seorang hakim. Umar mengingatkan Abu Musa al-Asy'ari dalam tugasnya bahwa semua orang mempunyai hak yang sama dalam hal pandangan atau pelayanan, fasilitas dan peradilan, sehingga orang yang lebih kuat tidak akan mengharapkan kemurahannya, dan orang yang lemah tidak kecewa akan keadilannya. Perlakuan yang sama tersebut berlangsung selama pemeriksaan perkara hingga ditetapkannya putusan hakim. Para pihak diberikan masing-masing hak dan kewajibannya berdasarkan hasil putusan yang ditetapkan hakim.

Seorang hakim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan perkara dengan adil, tapi juga dalam menerapkan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat selama penyelesaian masalah dengan memperlakukan mereka dengan adil. Seorang hakim harus memperlakukan hak yang sama di muka pengadilan meskipun

⁴¹Ramlah, *Eksistensi Risalatul Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Di Era Reformasi*, Jurnal, Diakses pada tanggal 13 November 2020.

⁴²Muhammad Ali Hasyimi, *Keadilan dan persamaan dalam masyarakat muslim*, <https://d1.islamhouse.com>data>chain>, diakses 2 januari 2020.

perselisihan itu terjadi antara seorang raja dan rakyatnya, orang kaya dan orang miskin, majikan dan pembantunya, teman dan musuhnya, atau seorang kerabat dan orang asing.

Masalah persamaan perlakuan pada orang yang berperkara, Nabi Muhammad saw. Berkata:”siapa yang diuji untuk menjadi hakim dikalangan kaum muslimin, maka hendaklah dia berlaku adil, baik dalam liriknya, isyaratnya, duduknya mau[pun persidangnya. Janganlah dia mengeraskan suara kepada salah seorang dari dua oarng yang bersengketa, sedang kepada yang lain tidak mengeraskan suara.⁴³

Ajaran islam pun menolak adanya perlakuan istimewa bagi seseorang karena alasan pejabat, bangsawan, hartawan, dan lain-lain yang tidak dibenarkan secara akal sehat. Penundaan pemeriksaan terhadap seseorang yang dapat dibenarkan adalah seperti sakit, atau sedang dalam perjalanan. Karena itu, pejabat yang ditunda untuk diperiksa oleh penegak hukum sebelum terbitnya izin pemeriksaan dari atasan pejabat tersebut adalah suatu perbuatan diskriminasi kemanusiaan.

Pemberian pelayanan keadilan yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu dan perbedaan agama, keturunan, ras, dan sosial telah dipraktikkan oleh Nabi saw. Rasulullah saw sangat mewanti-wanti agar perlakuan penegakan keadilan tidak diskriminasi. Nabi saw, bersabda:

قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الزَّيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

Artinya

⁴³Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, h. 71.

Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kamu adalah apabila seorang bangsawan di antara mereka mencuri, mereka melepaskannya (tidak dihukum). Akan tetapi, apabila yang mencuri itu rakyat jelata, mereka melaksanakan hukuman kepadanya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya.⁴⁴

Hadis diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum dan keadilan harus berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, baik kepada bangsawan, hartawan, ilmuwan, maupun kepada rakyat biasa, orang miskin, buta huruf, dan lain-lain. Siapa saja yang melakukan kejahatan, tindak pidana, atau pelanggaran hukum, harus diberi sanksi setimpal dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Penegakannya pun dilaksanakan sesuai dengan prosedur secara adil, benar, dan tidak menyimpang, dan berlaku kepada semua rakyat.⁴⁵

Umar Bin Khattab diangkat menjadi Khalifah pada tahun 634M/13H menggantikan khalifah sebelumnya yakni Khalifah Abu Bakar Assiddiq yang wafat. Umar Bin Khattab melaksanakan tugas dalam kekhalifahannya selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Dalam rentang waktu tersebut, Umar Bin Khattab mampu merealisasikan hal-hal yang besar dalam berbagai bidang untuk memperkuat dan memperluas islam. *Risalah Al-Qadha* yang merupakan pemikiran Umar Bin Khattab ini adalah salah satu bukti bahwa islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual muslim mempunyai pemikiran yang mengarah kemasa depan.

C. Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer.

Peradilan Militer merupakan institusi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menegakkan

⁴⁴Abu 'Abdillah Muhammad bin isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bab hadasama abu al-Yaman, juz 12, h.193. Hadis ini diriwayatkan pula oleh imam muslim, Ibnu Majah, al-Nasai, Ahmad bin Hanbal, dan lain lain.

⁴⁵Abd Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*, h. 71.

hukum dan keadilan. Pengadilan Militer tidak berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI tetapi berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung republik Indonesia. Filosofi terjadinya ketidak mandirian dalam sistem peradilan militer, yaitu karna faktor kepentingan militer (TNI) yang berkaitan dengan tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, yaitu dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga kepaperaan di dalam sistem penegakan hukum tersebut.⁴⁶

Yuridiksi Absolut peradilan militer di atur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang di dilakukan oleh seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Seseorang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
- d. Seseorang yang tidak termasuk dalam huruf a, b atau c diatas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.⁴⁷

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI berada pada pengadilan Militer, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer. Tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang hanya diatur dan dirumuskan dalam KUHPM. Sedangkan tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang

⁴⁶Devi Wahyuni, *Perbedaan dalam penanganan perkara pidana pada tingkat pemeriksaan pendahuluan antara sistem peradilan umum dengan peradilan militer berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia*, Skripsi, hal.3. Diakses pada 10 juli 2020.

⁴⁷Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 9.

pengaturan dan perumusannya terdapat dalam KUHP maupun Undang-Undang pidana lainnya diluar KUHP.

Terjadi perubahan paradigma mengenai *Yurisdiksi* peradilan terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana di era reformasi. Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong adanya tuntutan perubahan diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu tuntutan perubahan yang mendasar adalah perlunya dilakukan penataan kembali reposisi lembaga peradilan dalam mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Reposisi ini mendapat landasan hukum yang kuat melalui sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 agustus 2000. Landasan hukum reposisi tersebut dapat dilihat dalam Tap MPR Nomor VII tahun 2000 tentang peran TNI dan peran POLRI.⁴⁸

Pasal 3 ayat (4) huruf a Tap MPR Nomor VII tahun 2000 menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. ketentuan pasal ini kembali dipertegas dalam pasal 65 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini bertentangan dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, masyarakat perlu mempertimbangkan kesesuaian antara jenis dan muatan hukum yang akan diatur. Disamping mempertimbangkan pula Efektivitas kemungkinan dapat diterima, diberlakukan dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut dimasyarakat. Mendasari hal tersebut, untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga peradilan,

⁴⁸Niken Subekti Utami, *Yuridiksi peradilan terhadap prajurit TNI sebagai pelaku tindak pidana*

seyogyanya ditempatkan secara proporsional pada resim hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diantara lain pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Akan menjadi tidak tepat apabila pengaturan tentang lembaga peradilan khususnya tentang kompetensinya peradilan militer ditempatkan pada rezim hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara yang bersumber pada pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara.⁴⁹

Mengingat pengaturan tersebut ditempatkan dalam dua perundang-undangan, maka secara yuridis kedua undang-undang itu mempunyai kekuasaan hukum yang sama. Yang diperlukan adalah politik hukum untuk melakukan revisi dengan pengaturan sesuai rezim hukumnya. Sebagai alternatif diadakan revisi yang dapat dilakukan melalui pengaturan di dalam RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap KUHPM sebagai hukum materiil.

Dengan belum berfungsinya kekuasaan peradilan umum bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI, maka berarti bahwa bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum masih tunduk pada peradilan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo pasal 2 KUHPM.⁵⁰

⁴⁹Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 55 Diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

⁵⁰Fachruddien, *Reformasi Bidang Pertahanan Dan Hukum Nasional Dan Implikasinya Bagi Pembinaan Personel Militer*, (Makalah disampaikan pada penataran perkembangan hukum nasional dan hukum internasional bagi personel TNI dilingkungan Peradilan Militer, Makassar, 2007), h. 4.

Apabila ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer khususnya kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum, diubah atau ditiadakan/dihapuskan maka akan terjadi kevakuman hukum dan kevakuman peradilan karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak atau belum mengatur tentang kekuasaan peradilan umum sebagaimana maksud pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum secara pribadi.⁵¹

Militer dalam pandangan masyarakat Indonesia merupakan suatu institusi yang eksklusif yang kedudukannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Anggapan ini merupakan salah satu penyebab munculnya desakan kepada pemerintah agar membuat peraturan yang dimana menghendaki agar militer tunduk kepada badan peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Sementara masyarakat militer menganggap peradilan militer di perlukan oleh militer sebagai sarana agar terdorongnya peningkatan dan pembinaan terhadap kedisiplinan bagi militer, oleh karena itu diperlukan kekhususan bagi masyarakat militer.

Dilihat dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat membentuk dan membina Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kuat, profesional,

⁵¹Fachruddien, *Reformasi Bidang Pertahanan Dan Hukum Nasional Dan Implikasinya Bagi Pembinaan Personel Militer*, h. 4.

dan taat hukum karena tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.⁵²

Peran Perwira TNI dalam sistem peradilan militer yang menjalankan fungsi penyerahan perkara pidana anggota militernya kepada Pengadilan Militer menuai kekhawatiran didalam masyarakat, masyarakat khawatir terjadinya *Impunity* bagi militer yang melakukan tindak pidana. Namun kekhawatiran ini tidaklah mendasar karena kewenangan PAPERA diatur dalam undang-undang dan untuk perkara tindak pidana, pidana yang diatur dengan undang-undang tentu akan disarankan oleh Oditur sebagai tindak pidana pula. Berdasarkan kekhawatiran itu perlu diperhatikan bahwa salah satu kewenangan papera yang berkaitan dengan masalah hukum adalah kewenangan Papera dalam hal penutupan perkara.

Pasal 123 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dirumuskan bahwa perkara ditutup demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/ militer dengan alasan :

- a. tidak terdapat cukup bukti
- b. bukan merupakan tindak pidana
- c. perkara telah kadaluarsa
- d. tersangka/terdakwa meninggal dunia
- e. nebis in idem
- f. maksimum denda telah dibayar
- g. pengaduan telah dicabut (dalam delik aduan).

Kewenangan Papera ini diatur juga dalam KUHP dalam Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut dan menjalani pidana dengan demikian merupakan sistem peradilan pidana. Sedangkan untuk alasan penutupan perkara

⁵²Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, (Cet. I. Bandung; Mandar Maju, 1994), h. 15.

demokrasi kepentingan negara, demi kepentingan masyarakat/umum, demi kepentingan militer.

Terhadap perbedaan pendapat antara Oditur dengan Papera, apakah perkara tindak pidana diajukan ke Pengadilan atau tidak, maka akan diselesaikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Utama. Pengadilan Militer Tingkat Utama pada saat ini telah menjadi bagian dari mahkamah Agung baik secara organisasi, administrasi dan finansial, yaitu sebagai lambang supremasi hukum. Sehubungan dengan kewenangan dari PAPERA sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan akan dapat mengintervensi kemandirian dari pengadilan militer. Kewenangan yang dimiliki oleh PAPERA terhadap anggotanya yang sedang diperiksa di pengadilan, semata-mata demi kepentingan militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁵³

Timbul pula anggapan bahwa Peradilan Militer digunakan sebagai sarana untuk menghukum dengan pidana yang rendah atau untuk melindungi pelaku kejahatan oleh atasan atau komandannya. Para aktivis HAM dan LSM di Indonesia secara nyata juga menyampaikan bahwa tidak terungkapnya para penjahat HAM, seperti kasus semanggi, Tanjung Priuk, adalah contoh praktek perlindungan atasan atau komandan dalam proses peradilan militer.⁵⁴

Menurut Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H. hakim pengadilan militer dalam mengadili suatu tindak pidana yang dihadapkan kepadanya, bahwa hakim haruslah independen, mandiri, tidak ada kaitan dengan perkara terdakwa, entah itu kepangkatannya maupun lainnya. terhadap perbedaan hukuman dalam putusan hakim, dalam penjatuhan hukuman tidak dapat di pukul

⁵³Joko Sasmito, *Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer*, Jurnal, 2015. Diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

⁵⁴Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 78 Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

rata, hakim dalam memutus selalu berpandangan kepada perbuatan yang dilakukan tersangka.⁵⁵

Anggapan adanya intervensi dari atasan atau komandan identik dengan profil Pengadilan Militer di Indonesia, tentu saja anggapan tersebut di tentang keras oleh penegak hukum pidana militer, bahkan bagi militer itu sendiri. mereka balik mempertanyakan apakah dalam sistem peradilan pidana pada *Justitiabel* peradilan umum telah bersih dari intervensi dan mengapa mafia hukum masih merajalela.⁵⁶

Hakim di Lingkungan Peradilan Militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima TNI berdasar persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer bebas memberikan putusannya serta ada jaminan bahwa baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Ditinjau dari segi kelembagaan, organisasi di lingkungan Pengadilan Militer sudah dikenal adanya struktur kelembagaan yang kuat, disiplin yang tinggi dengan aturan yang ketat, adanya asas kesatuan komando, adanya hubungan atasan-bawahan diatur tegas, perlunya jiwa korsa dan lain-lain.

Hakim militer dalam mengadili suatu perkara terdapat hubungan hukum antara hakim militer dengan atasan, baik secara langsung maupun tidak, kematraan maupun secara structural. Pada saat hakim atau Majelis hakim menyidangkan perkara, mereka mereka bukan kapasitasnya sebagai bawahan papera, untuk memberi hukuman kepada terdakwa, namun mereka sebagai pelaksana dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) guna memberikan keadilan bagi para pihak, baik oditur, maupun terdakwa atau penasihat hukum termasuk masyarakat

⁵⁵Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.

⁵⁶Muhammad ishar helmi, *Penerapan Asas Similia Similibus pada peradilan militer*, jurnal (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2013) , h.5. Diakses Pada Tanggal 4 november 2019.

atau militer. Komandan bertanggungjawab penuh atas baik buruknya kesatuan yang dipimpinnya.⁵⁷

Di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwa hakim harus bersikap mandiri dalam penerapannya diatur bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, dan Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislative serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian hakim dan badan peradilan, serta hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.⁵⁸

Pasca peraturan satu atap dengan Mahkamah Agung RI bagi para hakim militer, merupakan solusi terbaik bagi pro dan kontra tentang kemandirian para penegak hukum dalam *Justitiabel* peradilan militer. Menurut Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H. Pengadilan Militer merupakan suatu instansi yang berbeda dan terpisah dari kesatuan TNI, sehingga hakim pengadilan militer itu mampu menempatkan diri kapan menjadi militer dalam kesatuan dan kapan mekadi militer dalam persidangan, ketika hakim militer yang notabenenya adalah prajurit militer berada diposisi persidangan maka kacamata yang dipakai ialah kacamata kemandirian.⁵⁹

Tuntutan rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat diatas, tentu bukanlah sesuatu yang pasti benar dalam penilaian aspek proses dalam persidangan pidana. Kemandirian profesi seorang hakim sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan langkah penyusun undang-undang dengan meletakkan para hakim

⁵⁷Amiroeddin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, (Cet. I, Jakarta : Golia Indonesia,1983), h. 47.

⁵⁸Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

⁵⁹Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.

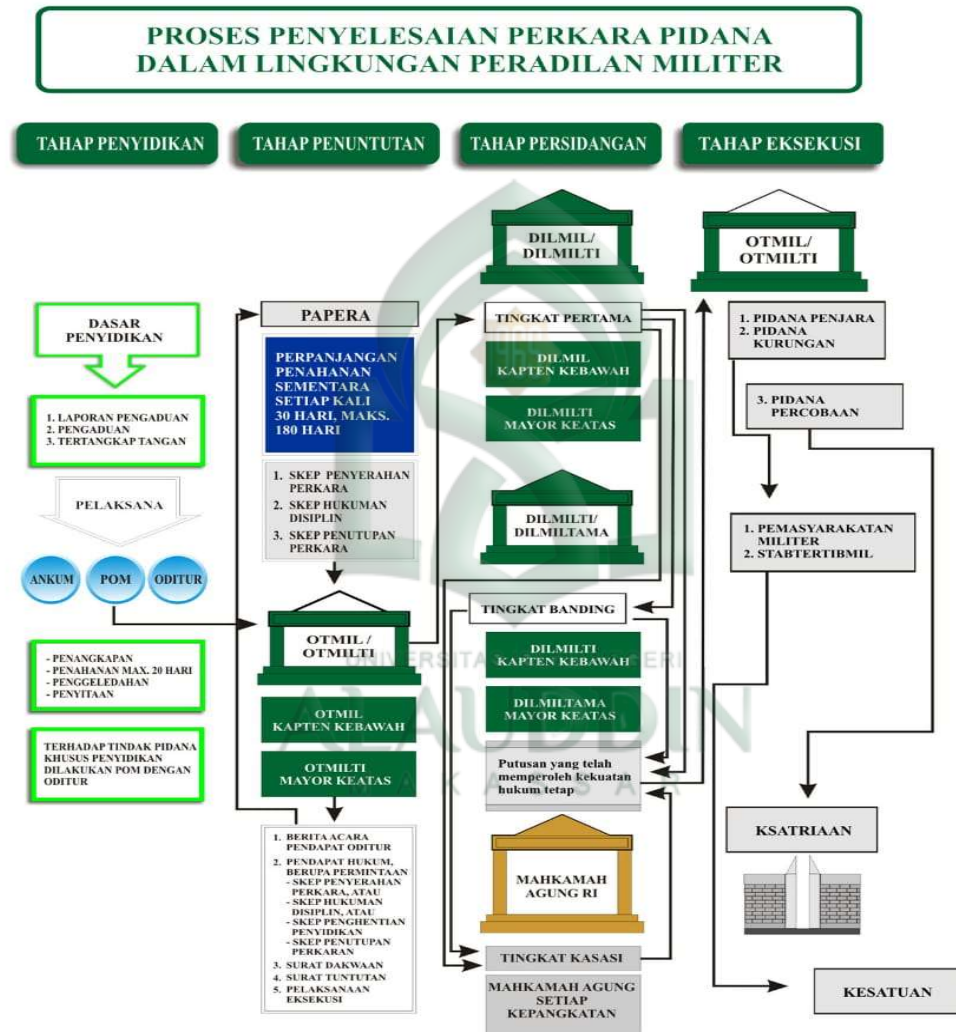
militer dalam satu atap dengan Mahkamah Agung RI merupakan suatu kemajuan tersendiri bagi sistem peradilan pidana militer di Indonesia. Campur tangan komandan atau atasan dapat terpangkas secara organisatoris, administrasi dan finansial dalam sistem satu atap. Badan Pembinaan Hukum TNI sebagai Staf Panglima TNI tidak lagi mempunyai kewenangan yang dapat mencampuri kemandirian hakim militer.⁶⁰

D. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan oleh Prajurit Berpangkat Kapten Dan Prajurit Berpangkat Prada Dengan Menerapkan Asas Equality Before The Law

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana dalam lingkup Pengadilan Militer memiliki suatu mekanisme tersendiri dan dilakukan oleh lembaga hukum tertentu yang ditunjuk undang-undang. Ketika seorang prajurit melakukan tindak pidana maka dia akan ditangkap, ditahan, diselidiki serta ditindaklanjuti dengan proses penyidikan untuk membuktikan keabsahan tindakannya itu. Setelah itu dilanjutkan ketahap penyelesaian perkara di muka persidangan.

⁶⁰Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 81 Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

Namun terlebih dahulu, sebelum memasuki tahapan persidangan di dalam lingkup Pengadilan Militer, agar lebih mudah untuk memahaminya lihat pada bagan penyelesaian perkara tindak pidana didalam lingkup Pengadilan Militer berikut ini.⁶¹



Keterangan gambar bagan diatas sebagai berikut:

1. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI;

⁶¹ www.dilmil-semarang.go.id Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

2. Hasil pemeriksaan sementara oleh Ankum dan terdapat unsur pidana didalamnya;
3. Ankum serahkan kasus ke POM;
4. POM menyerahkan Hasil penyelidikan (BP) kepada Oditur Militer;
5. Oditur Militer mengolah perkara dan selanjutnya memberikan pendapat saran hukum tentang penyelesaian perkara kepada PAPERA;
6. Apabila PAPERA sependapat perkara diselesaikan melalui Pengadilan maka PAPERA mengeluarkan Skeppera (surat keputusan penyerahan perkara) dan berikan kepada oditur untuk dilanjutkan kepengadilan militer, Namun apabila PAPERA berpandangan bahwa kasus ini bukan tindak pidana melainkan pelanggaran disiplin maka PAPERA akan Mengeluarkan Skepkumlin (surat keputusan hukum pelanggaran disiplin) dan apabila PAPERA berpandangan bahwa kasus tindak memiliki unsur pidana dan pelanggaran hukum disiplin, maka PAPERA akan mengeluarkan Skeptupra (surat keputusan penutupan perkara)
7. Oditur Militer menyerahkan berkas perkara dan Skeppera kepada Dilmil yang dilengkapi dengan surat dakwaan.
8. Dilmil melaksanakan persidangan
9. Putusan pengadilan
10. Terdakwa/Oditur mengajukan banding
11. Terdakwa/Oditur mengajukan kasasi.⁶²

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara di peradilan militer memiliki 4 tahapan yakni:

a. Tahapan Penyidikan

1. Penyidik

⁶²<https://ppid.tni.mil.id> Diakses pada tanggal 09 juli 2020.

Pejabat yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyidik dan penyidikan sesuai dengan wewenang yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ialah Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Polisi Militer (POM), dan Oditur Militer.

a. Ankum

Atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang merupakan komandan pasukan dari prajurit TNI yang melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun disiplin militer yang atas dasar Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya.

Hal penting yang perlu diketahui tentang Ankum sebagai Penyidik adalah:

- Penyidik, Ankum tidak melaksanakan proses penyidikan secara langsung tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh POM dan Oditur Militer.
- Disamping penyidik, Ankum juga sebagai komandan satuan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, sehingga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan proses penyidikan.
- Sebagai penyidik, Sebagian besar yang menjabat sebagai Ankum bukanlah seorang sarjan hukum yang mempunyai pemahaman tentang hukum yang tentunya tidak sepaham POM atau Oditur yang berkualifikasi sarjana hukum.

b. Polisi Militer (POM)

Untuk tugas penyidikan dalam lingkup Militer dilaksanakan oleh POM dalam satu kecabangan TNI-AD yang dibina Oleh Kasad. Dengan berpedoman Kepada keputusan Pangab tersebut maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh Puspomad.

c. Oditur Militer (ODMIL)

Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebut Oditur Jenderal adalah Penuntut Umum ter-tinggi dilingkungan Angkatan Bersenjata, pimpinan dan penangung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat. Oditurat adalah badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Oditur dalam menjalankan Fungsi Penyidikan berdasarkan perintah Oditur jenderal, melengkapi berkas perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan dalam lingkup peradilan militer, dan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penyidikan, pelimpahan perkara, penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam lingkup pengadilan militer.⁶³

2. Penyidikan

Salah satu proses terpenting dalam menyelesaikan perkara pidana ialah proses penyidikan. Karena pada proses penyidikan inilah tindakan penyidik ditekankan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sehingga dari proses inilah seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku sebuah tindak pidana atau bukan.

Proses penyidikan suatu tindak pidana dapat berasal dari berbagai sumber yakni:

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan

⁶³Aslinda Rahayu, *Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar*, Skripsi, h. 46. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa ditindak lanjuti ketahap penyidikan. Proses penyelidikan atas dugaan tidan pidana, secara administratif dimulai sebelum atau sesudah adanya laporan atau aduan dugaan tindak pidana, apabila dianggap sebagai suatu tindak pidana maka akan diterbitkan surat perintah penyidikan.⁶⁴

b. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena berdasarkan hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah, sedang atau akan terjadi.

c. Pengaduan

Pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

d. Tertangkap tangan

Merupakan peristiwa dimana tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan, membantu melakukan tindak pidana itu.⁶⁵

Suatu penyelidikan dan penyidikan dimulai dari adanya laporan polisi, dalam laporan polisi kepada Polisi Militer memuat keterangan yang jelas tentang

⁶⁴ Aristo M.A. Pangaribuan, dkk., *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (cet.I, Jakarta; Rajawali pers, 2017), h. 39.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 1.

waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian, akibat kejadian (misal: mati, luka-luka, kekerasan atau kehilangan barang), identitas serta alamat tersangka dan para saksi.

Namun terhadap laporan yang berasal dari kepolisian kepada Polisi Militer tersebut memiliki syarat haruslah merupakan suatu kejadian yang merupakan tindak pidana, fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana, dan tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang disamakan. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan maka disamping laporan polisi harus juga dibuatkan pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Setelah adanya laporan atau aduan yang diterima Polisi militer, maka akan dilakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi. Pemanggilan tersangka dan saksi anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan yang dialamatkan kepada Anaknya dengan permohonan supaya diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan, dan untuk pemanggilan saksi bukan anggota TNI dilakukan dengan surat panggilan dan disampaikan kepada yang bersangkutan ditempat tinggalnya namun apabila alamat tidak jelas maka dapat melalui pihak kelurahan atau apabila saksi merupakan seorang karyawan maka dapat dilakukan pemanggilan melalui instansinya.

Setelah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi terhadap suatu peristiwa yang dianggap tindak pidana, dan tersangka dan saksi memenuhi pemanggilan tersebut maka penyidik akan melakukan proses pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana dan untuk memperoleh alat bukti selengkapanya yang dapat mempercepat proses pembuktian terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka.

Terhadap hal seorang tersangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib menyampaikan kepada tersangka mengenai haknya mendapatkan bantuan hukum atau bahwa perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum, dan untuk kelancaran pemeriksaan dipengadilan. Apabila dikhawatirkan di antara para saksi tidak dapat hadir dalam persidangan karena suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, sakit, meninggal dunia, atau pindah daerah, setelah pemeriksaan para saksi diambil sumpahnya untuk memperkuat keterangan dilengkapi dengan berita acara pengambilan sumpah. Penyidikan perkara juga dapat dilakukan oleh oditur dimana panglima memerintahkan kepada Oditurat Jenderal TNI kemudian Oditurat Jenderal memerintahkan Oditur untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.⁶⁶

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terkait mengenai kelancaran proses penyidikan yaitu:

1. Penangkapan

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶⁷ Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, untuk kepentingan proses penyidikan, penyidik berwenang melakukan penangkapan, pelaksanaannya dilakukan dengan surat penangkapan. Untuk penangkapan tersangka diluar daerah yuridiksi Ankumnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menangani perkaranya, dengan surat perintah.

⁶⁶Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 52. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 1.

Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, untuk pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 2 kali namun tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, maka dapat dilakukan penangkapan terhadapnya. Penangkapan dilaksanakan dengan tengak waktu 1 hari, pelaksanaan penangkapan dilakukan penyidik, atau POM atau anggota Ankum yang bersangkutan dengan disertai surat perintah penangkapan yang dicantumkan identitas tersangka dan alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa dan diperlihatkan kepada tersangka. Dalam hal pelaku tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka dan barang bukti (bila ada) kepada penyidik. Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga dan penyidik melapor kepada Ankumnya.

2. Penahanan

Penahanan didefinisikan sebagai suatu tindakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik Militer atas perintah Ankum, Papera atau Hakim Ketua Majelis, atau kepala pengadilan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan persidangan. Penahanan juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam hal tertangkap tangan sekedar untuk menyerahkan tersangka kepada yang berwenang.

Perihal mengenai penahanan dapat dilakukan oleh setiap perwira yang lebih tinggi pangkatnya, sekedar untuk segera menyerahkannya kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum). Ankum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap bawahannya yang melakukan tindak pidana. Polisi Militer dan atau Oditur Militer dapat melakukan penahanan dalam hal tersangka tertangkap

tangan, ada delegasi kekuasaan dari perwira penyerah perkara (PAPER) atau atasan yang berhak menghukum, tersangka berada diluar yuridiksi Paper/Ankum, tersangka adalah anggota militer yang melakukan tindak pidana sewaktu masih aktif di dalam dinas tapi kemudian tidak diketahui lagi dengan jelas siapa Ankumnya.⁶⁸

Kewenangan Ankum menahan selama 20 hari sedangkan kewenangan Paper untuk melakukan penahanan adalah 30 hari dapat dilakukan perpanjangan masa penahanan paling lama 180 hari. Lamanya masa penahanan tersebut perihal untuk proses penyidikan dalam mencari bukti yang sah dan menyakinkan berdasarkan bukti permulaan. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun turut serta dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana Sembilan tahun atau lebih.

Terhadap penahanan atau perpanjangan penahanan dapat dilakukan penangguhan oleh Ankum atau PAPER atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari POM atau Oditur dengan syarat:

a. syarat umum: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

- tidak akan menyulitkan jalannya pemeriksaan;
- tidak akan melarikan diri; K A S S A R
- tidak melakukan kerusakan terhadap barang bukti;
- tidak mengulangi melakukan tindak pidana

b. persyaratan khusus

memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh Ankum atau PAPER, misalnya wajib lapor.

⁶⁸Sufriaman Amir, *Proses Penyelesaian perkara di Peradilan Militer*, <http://amankpermahimakassar.blogspot.com> Diakses pada tanggal 09 juli 2020.

Perihal penyitaan dan pengeledahan, memang tidak disyaratkan surat perintah dari Ankum tersangka, cukup surat perintah dari Komandan atau atasan penyidik. Namun demikian pelaporan kepada atasan yang berhak menghukum setelah tindakan tersebut dilakukan merupakan suatu keharusan. Kewenangan Ankum dalam penyidikan perkara pidana anggota militer merupakan hal logis, mengingat setiap prajurit TNI merupakan bagian dari suatu fungsi pertahanan yang sangat penting bagi keutuhan negara.

b. Tahapan Penuntutan

Menurut Mayor Chk Hasta Sukidi S.H., M.H.⁶⁹ Setelah penyidik dalam hal ini polisi militer selesai melakukan penyidikan terhadap tersangka, selanjutnya dilakukan penyerahan berkas perkara kepada Oditur Militer, Oditur yang melakukan penuntutan dijabat oleh seorang perwira militer. Selanjutnya Oditur akan mempelajari berkas perkara yang diserahkan kepadanya terkait syarat formil/materilnya. Apa bila hasilnya belum lengkap atau dianggap kurang, berdasarkan pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer maka Oditur dapat melakukan penyidikan tambahan atau mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk agar dilengkapi.

Berkas perkara Desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, maka berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan syarat kelengkapan berkas. Apabila hasil penyidikan dianggap lengkap, maka Oditur selanjutnya membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada PAPERA dengan permintaan agar perkara diserahkan ke pengadilan, di disiplinkan, atau ditutup.

Adakalanya terdapat perbedaan pendapat antara PAPERA dengan Oditur mengenai penyelesaian perkara. Misalnya Oditur berpandangan bahwa perkara memnuhi unsur pidana sehingga pantas diselesaikan melalui pengadilan militer,

⁶⁹Mayor Chk Hasta Sukidi S. H., M. H, Oditur Militer, *wawancara*, Makassar, 09 Juli 2020.

sementara PAPERA berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan, maka berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, masing-masing pihak harus mengajukan permasalahan beserta alasan-alasannya kepada pengadilan militer utama untuk diputus. Guna memutus sengkata itu, pengadilan militer utama mendengar pendapat dari Oditurat jenderal di persidangan, kemudian memutus perkara tersebut apakah perkara itu diajukan ke pengadilan atau tidak. Putusan pengadilan militer utama bersifat final sehingga baik PAPERA maupun Oditur harus mengikuti apa yang ditegaskan dalam putusannya.

Setelah itu PAPERA akan membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dan diserahkan kepada Oditur. Oditur segera melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan militer yang berwenang disertai dengan suatu surat dakwaan yang memuat secara lengkap, cermat dan jelas identitas terdakwa dan uraian unsur-unsur tindak pidana serta pasal-pasal yang dilanggarnya.

c. Tahapan Persidangan

Sebelum perkara pidana tersangka disidangkan, diperlukan proses dalam hal administrasi, diantara lain. *Pertama*, penerimaan berkas perkara dari Oditur Militer diterima oleh KATAUD dan dicatat dalam agenda surat masuk, selanjutnya berkas perkara digabungkan dengan surat-surat lain yang terkait perkara tersebut. *Kedua*, Kepala pengadilan militer kemudian menyerahkan berkas perkara kepada KATERA melalui KATAUD untuk dicatatkan dalam register perkara dan kepala pengadilan militer meneliti berkas perkara tersebut apa sudah memenuhi syarat formil maupun materil.

Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa pengadilan yang dipimpinnya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena terdakwa berubah pangkat dari perwira pertama ke perwira menengah maka berkas perkara harus segera dikembalikan ke Oditur Militer dengan penetapan untuk dilimpahkan ke

pengadilan yang lebih berwenang. Dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain diluar *yurisdiksi* suatu pengadilan maka berkas perkara segera dikembalikan ke Oditur militer dengan ketetapan dari kepala pengadilan untuk dilimpahkan ke pengadilan yang *yurisdiksinya* meliputi tempat tugas terdakwa (sesuai pasal 10b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997). Dalam hal kepala pengadilan militer berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan pengadilan yang dipimpinnya maka ia segera menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan panitera membuat rencana sidang untuk diserahkan kepada Oditur militer dengan perintah supaya Oditur memanggil terdakwa dan para saksi untuk hadir dipersidangan.⁷⁰

Mengenai pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 mengatur empat acara persidangan, yakni:

1. Acara pemeriksaan biasa.
2. Acara pemeriksaan Koneksitas.
3. Acara pemeriksaan khusus.
4. Acara pemeriksaan cepat.

Acara pemeriksaan biasa dilakukan untuk perkara-perkara pidana berat yang sulit pembuktiannya, acara pemeriksaan ini dilakukan oleh majelis hakim. Dalam persidangan Oditur membuktikan kesalahan terdakwa dengan membacakan surat dakwaan dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi.⁷¹

Acara pemeriksaan Koneksitas dilakukan apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota militer dan pihak lain yang tunduk terhadap *yurisdiksi* peradilan umum. Menurut Mayor Sus Rahmansyah

⁷⁰Peni Saptaning Putri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*, Tesis. h. 52. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

⁷¹Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 203.

Faharuddin, S.H., M.H. Sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 89 ayat (1) yang dimana di adopsi kedalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disitu dikenal adanya lembaga Koneksitas. Acara pemeriksaan Koneksitas dapat dilakukan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Militer tergantung kepada keputusan Mahkamah Agung dan Mabes TNI. Biasanya dilihat dari kepentingan yang lebih banyak dirugikan, apabila kepentingan lebih banyak yang dirugikan kepada Pengadilan Negeri maka akan disidangkan di Pengadilan Negeri dengan komposisi tiga orang hakim. Dua dari Pengadilan Negeri dan satu dari Pengadilan Militer.

Ketika perkara itu disidangkan dan keputusannya disidangkan di Pengadilan Militer, komposisinya juga terdiri dari tiga hakim, dua hakim dari Pengadilan Militer dan satu dari Pengadilan Negeri. Dan bisa juga ada opsi dari kejaksaan untuk memecah meski perkaranya sama yang dilakukan oleh masyarakat umum dan masyarakat militer dipecah, yang masyarakat umum di adili di Pengadilan Negeri dan yang masyarakat militer di adili di Pengadilan Militer.⁷²

Acara pemeriksaan khusus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir. Maksud ketentuan tersebut adalah bahwa terhadap putusan pengadilan pertempuran tidak boleh diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi (pasal 204 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997).

Acara pemeriksaaan khusus dapat dilakukan menurut tata cara pemeriksaan biasa. Tetapi dalam hal pembuktian ada ketentuan yang berbeda, dimana hakim dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan pengetahuan hakim dan barang

⁷²Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.

bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan di atas sumpah dari pejabat yang berwenang.⁷³

Untuk perkara yang pemeriksaannya digunakan menurut acara cepat adalah perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk perkara acara cepat tidak diperlukan berkas acara pemeriksaan, cukup dengan berita acara pelanggaran lalu lintas. Surat dakwaan diajukan oleh Oditur sekaligus dengan tuntutan hukumannya, perkara acara cepat dilakukan oleh seorang hakim saja atau tunggal tanpa harus menghadirkan terdakwa kedalam persidangan.⁷⁴

Setelah semua kelengkapan sidang telah lengkap, maka sidang dapat dimulai. *pertama*, penghadapan terdakwa, Oditur sebelum majelis hakim memasuki ruang persidangan harus sudah siap diruangan, setelah hakim ketua membuka sidang, hakim ketua memerintahkan Oditur untuk menghadapkan terdakwa ke depan majelis hakim, lalu Oditur memerintahkan petugas persidangan untuk menghadapkan terdakwa ke persidangan. *Kedua*, pembacaan surat dakwaan, Oditur membacakan surat dakwaan dengan sikap berdiri, setelah selesai oditur duduk kembali. *Ketiga*, eksepsi, terdakwa/penasihat hukum terdakwa apabila keberatan terhadap surat dakwaan oditur maka dapat mengajukan eksepsi dengan seijin hakim ketua.⁷⁵ Dalam hal guna kepentingan pembelaan, terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk mendampingi dalam persidangan, pemberian dan bantuan dan nasehat hukum kepada anggota TNI diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI tentang petunjuk pelaksanaan. Dalam hal terdakwa dijerat dengan dakwaan hukuman pidana mati, pidana penjara lima belas tahun atau lebih, pidana penjara lima tahun atau lebih sedangkan

⁷³Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 205.

⁷⁴Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Pasal 211.

⁷⁵Odi Eka Putra, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)*, Skripsi, 2014, h. 14. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

terdakwa tidak mampu mengusahakan penasihat hukum sendiri, maka hakim ketua wajib mengusahakan penasihat hukum bagi terdakwa melalui papera yang bersangkutan atas biaya negara untuk mendampingi terdakwa di persidangan, kecuali terdakwa sanggup mengusahakan sendiri penasihat.

Menurut Mayor Sus Rahmansyah faharuddin S. H., M.H. dalam hal pengajuan pensihat pendampingan hukum yang diutamakan ialah yang bersala dari dinas TNI sendiri karena harapannya dalam dinas TNI telah ada dinas pendampingan hukum dan diberikan secara cuma-cuma, dan ketika yang bersangkutan menghendaki pendampingan dari luar pengadilan tidak mempermasalahkann namun digaris bawahi bahwa dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang pengadilan militer mempersyaratkan bahwa harus memiliki izin dari PAPERERA untuk mendampingi terdakwa, karena didalam TNI komandan itu berperan sebagai bapak dari bawahannya sehingga tidak mungkin ada pendampingan tanpa seizin komandannya (PAPERERA).⁷⁶

Keempat, pemeriksaan saksi. Oditur menghadapkan saksi kedepan majelis hakim atas perintah dari hakim ketua, lalu oditur memerintahkan kepada petugas untuk memasukkan saksi kedalam persidangan kemudian saksi diambil sumpahnya yang dipandu hakim anggota, kemudian Oditur militer mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi secara langsung. Setelah Oditur selesai bertanya dan saksi menjawab pertanyaan dari oditur, maka hakim mempersilahkan kepada pihak terdakwa baik diwakili penasihatnya atau langsung oleh terdakwanya sendiri untuk menanggapi kesaksian yang dilontarkan oleh saksi, kemudian hakim mempertanyakan kepada saksi mengenai tanggapan dari terdakwa. *Kelima*, Pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa dilakukan setelah sidang pemeriksaan saksi/saksi ahli selesai. Terdakwa diperiksa dengan diberikan

⁷⁶Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.

pertanyaan-pertanyaan oleh hakim berdasarkan berkas perkara serta kesaksian para saksi yang diajukan oleh Oditur. *Keenam*, pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan saksi dan terdakwa selesai, tahapan persidangan selanjutnya ialah pemeriksaan barang bukti, majelis hakim msemperlihatkan kepada terdakwa barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti dan sangkut paut barang bukti dengan perkara terdakwa. *Ketujuh*, setelah tahapan pemeriksaan barang bukti, maka tahapan persidangan selanjutnya ialah pembacaan SStuntutan oleh Oditur Militer. setelah pembacaan tuntutan selesai, hakim akan mempertanyakan kepada terdakwa bahwa apakah terdakwa ingin mengajukan pledoi atau tidak, apabila terdakwa atau diwakili oleh penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan pledoi maka tahap selanjutnya ialah mendengarkan pledoi dari terdakwa. Lalu dilanjutkan dengan replik dari pledoi terdakwa oleh oditur. *Kedelapan*, musyawarah majelis hakim, setelah semua acara pemeriksaan selesai, maka hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup. Kemudian menunda sidang untuk memberikan majelis hakim untuk bermusyawarah guna mengambil keputusan. *Kesembilan*, pembacaan putusan pengadilan, Apabila majelis berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman pidana. Namun apabila hakim berpandangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Setelah putusan pengadilan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, maka panitera membuat akte putusan telah berkekuatan hukum tetap.⁷⁷

Terkait mengenai putusan pengadilan, Mayor Sus Rahmansyah Faharuddin S.H.,M.H. bahwa apabila dalam putusan hakim yang dikeluarkan pengadilan

⁷⁷Odi Eka Putra, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)*, Skripsi, 2014, h. 14. Diakses pada tanggal 10 juli 2020.

memutus terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana serta pemecatan dan atau pemberhentian dari instansi TNI, maka terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan pada umumnya, namun apabila dalam putusan hanya dikenakan putusan pidana saja, maka terdakwa akan ditahan di lembaga pemasyarakatan militer (LEMASMIL) dan ketika telah melaksanakan masa pidananya maka terdakwa tersebut akan kembali menjalani tugasnya sebagai prajurit.⁷⁸

d. Pelaksanaan Putusan

Putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh oditur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

1. pidana penjara maupun pidana kurungan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan militer atau ditempat lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila ditempat kedudukan Pengadilan Militer dan Oditur Militer tidak memiliki lembaga pemasyarakatan militer, maka terpidana dikirim ke lembaga pemasyarakatan militer terdekat.
2. terpidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan dan dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia melaksanakan pidana yang pertama, maka putusan pengadilan akan dilaksanakan dengan pidana yang dilakukan lebih dahulu.
3. terpidana yang dikenakan pidana pemecatan dari dinas TNI akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan umum.⁷⁹

⁷⁸Mayor Sus Rahmansyah Fharuddin S. H., M. H, Hakim Pengadilan Militer, wawancara, Makassar, 08 Juli 2020.

⁷⁹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 256.

4. terpidana yang dijatuhi pidana denda di beri tenggang waktu selama satu bulan namun jika memiliki alasan yang kuat, maka tenggang waktu dapat di perpanjang paling lama satu bulan. Kecuali dalam putusan pemeriksaan acara cepat, pembayaran dendanya harus dilunasi seketika.⁸⁰
5. terpidana yang dijatuhi hukuman pidana bersyarat maka pelaksanaan dan pengawasan dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Kepala Pengadilan yang bersangkutan dibantu oleh satu orang hakim atau lebih.⁸¹
6. terpidana yang dijatuhi hukuman perampasan barang bukti untuk negara, maka Oditur akan menyerahkan barang bukti kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual dalam waktu tiga bulan dan dapat di perpanjang paling lama satu bulan dan hasilnya di masukkan ke kas negara atas nama Oditurat.⁸²
7. terpidana yang dijatuhi putusan ganti rugi, pelaksanaannya akan dilakukan menurut tata cara putusan perdata. jika satu perkara terdapat lebih dari satu terpidananya, maka pembayaran ganti rugi dibebankan kepada para terpidana bersama-sama secara seimbang.⁸³

⁸⁰Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 258.

⁸¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 262.

⁸²Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 259.

⁸³Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 260.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dibahas diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Risalah Alqada Umar Bin Khattab merupakan surat yang ditujukan kepada para hakim yang menjalankan tugas peradilan yang mewakilinya didaerah-daerah kekuasaan islam, terdiri atas 11 aturan yang salah satunya ialah menyamakan para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat dalam persidangan maupun dalam putusan. Hal ini sama dengan konsep asas Equality Before The Law yang dimiliki dunia barat, yang dimana tujuannya ialah bagaimana mewujudkan keadilan. Namun asas Equality Before The Law baru dikenal dunia barat pada abad ke 11 masehi, sedangkan Umar Bin Khattab sendiri menjadi khalifah pada abad ke-6 Masehi, sehingga dapat dikatakan bahwa islam telah mengenal lebih dulu mengenai bagaimana konsep menyamakan para pihak dalam pengadilan yang merupakan konsep yang ada dalam asas Equality Before The law.

2. pertama, persoalan peradilan bukan hak yang merata dirasakan, bisa diakses atau terinformasikan bagi setiap orang di Indonesia. Dengan kata lain Equality Before The Law tidak terlaksanakan dengan baik dan otomatis hanya dengan modal norma hukum, institusi dan penyediaan Sumber Daya Manusia; kedua, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi peradilan yang menghambat pemenuhan dan pelaksanaan EBL seperti masalah ekonomi dan pendidikan warga sebagai penikmat peradilan, bahkan masalah pendidikan juga menjadi problem di kalangan para penegak hukum. Masalah politis juga muncul sebagai penekan berjalannya proses peradilan terutama pada kasus Kriminalisasi. Dalam pra Judicial process,

melibatkan penyidik POM, penyidik Oditur, di mana Penyidik bekerja berdasarkan perintah komandan. Seringkali prinsip hukum kalah dari model perintah seperti ini. Sementara pihak pengadilan jarang berani melakukan koreksi atas kesalahan dalam penyidikan. Artinya SDM Pengadilan belum secara total menjadi independen dan obyektif, walaupun kini peradilan militer sendiri berada dibawah payung Mahkamah Militer yang demikian mampu memutus efek-efek tekanan yang berasal dari TNI secara langsung; Ketiga, masalah minimnya perubahan aturan (terutama hukum acara dalam berproses dalam peradilan). Meskipun di satu sisi disediakan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan mengubah aturan main hukum, namun hal ini tidak menjamin tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas hukum dan aksesibilitas masyarakat pencari keadilan untuk dengan mudah menggunakan dalam kepentingan haknya.

3. Pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Anjak, Polisi Militer, dan Oditur Militer yang bertindak sebagai penyidik, serta oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer.

B. Saran

untuk mengatasi tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI harus segera dilakukan perubahan-perubahan di KUHPM yang pengaturan tentang prajurit TNI sebagai subyek hukum pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana secara hukum pidana umum. Karena akan sulit mewujudkan apa yang diamantkan dalam Tap MPR No. VII tahun 2000 dan

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, apabila hukum materiil untuk militer (KUHPM) belum diubah atau direvisi.

kemudian untuk melaksanakan hukum pidana materiil diatas, harus juga dilakukan pembentukan hukum pidana formil atau revisi terhadap Undnag-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang sudah ada mengatur tentang peradilan pidana umum bagi prajurit militer. Serta mengamanatkan kepada badan peradilan umum agar tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit militer menjadi kewenangan absolutnya, agar tercapai asas *Equality Before The Law* untuk menghilangkan *Image* militer itu sebagai warga negara kelas satu (anak emas) di negeri ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Faisar, Ananda, Dkk, *Metode Studi Islam*. Depok; PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Faisal Salam, Moch, *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung;Mandar Maju,1994.
- Halim Talli, Abd. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa*. Makassar: Alauddin University Press,2016.
- Halim Talli, Abd. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah Al-Qada*. Yogyakarta: UII PRESS,2014.
- M.A. Pangaribuan, Aristo,dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 2017.
- Musliadi. *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*. Jakarta: Permata Press,2013.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian* . Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Kontras. *Menerobos Jalan Buntu Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer Indonesia*. Jakarta, PT Rinam Antartika cv, 2009.
- Pabbu, A., & Syamsuddin, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2014.
- Ridwan HR, *hukum administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sjarif, Amiroeddin. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*. Jakarta : Golia Indonesia,1983.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Sukarno, Aburaera. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar:Arus Timur,2012.
- Syamsuddin, R., & Aris, I. *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media, 2014.
- Syamsuddin, R. *Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan*. 2013.
- Syamsuddin, R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media. 2019.

Jurnal

- Azhar, Haris. *Equality Before The Law dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jurnal Lokataru ,Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati (Juli,2018).
- Ishar, Helmi Muhammad. *Penerapan Asas Similia Similius pada peradilan militer*, jurnal Cita Hukum Volume I Nomor 2 (Desember, 2013). hlm 10.
- Melisa Walukow, Julita. *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jurnal Lex et societatis volume I No.I (Januari,2013). hlm 164.

Sasmito, Joko. *Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Pengadilan Militer*, Jurnal Perspektif Volume XX nomor 1 (Januari,2015). hlm 16.

Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. *Upaya Penguatan Badan Penelitian Dan Pengembangan Serta Inovasi Daerah di Kota Palopo*, Jurnal Wawasan Yuridika,4(1). 2010. hlm 63-79.

Skripsi

Eka, Putra Odi. *Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Anggota TNI (studi kasus di Denpom Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, 2014.

Rahayu, Aslinda. *Peranan Oditur Militer IV-17 Makassar dalam P4GN di wilayah hukum pengadilan militer III-16 Makassar*. Skripsi UIN Alauddin Makassar. Makassar, 2019.

Saptaning Putri, Peni. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Mengadili Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang TNI*. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

Internet

Amir, Sufriaman. *Proses Penyelesaian perkara di Peradilan Militer*. <http://amankpermahimakassar.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 09 juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Gambar I.1 : Peneliti Melakukan Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

Jl. Bataara Bira No.5 B KM.16 Makassar Telp. 0411 518080 Fax 0411 518086
Website : www.dilmil-makassar.go.id Email : makassar@dilmil.org

Makassar, 30 Juni 2020

Nomor : W3.Mil05/ 7 /PB.00/VI/2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar
di-
Gowa

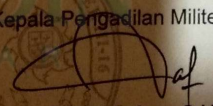
1. Dasar :

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B.-4219/SH.01/PP.00.9/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul "Penerapan Asas Equality Before The Law pada sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III-16 Makassar"
- b. Pertimbangan Pimpinan dan Staf.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat Bapak di atas untuk melakukan penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar.

3. Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Pengadilan Militer III-16


Adeng S. Ag., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980005390269

Tembusan :

1. Kadilmilti III Surabaya
2. Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa
3. Sdr. Ruslan ✓

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara dalam skripsi : Penerapan Asas Equality Before The Law pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III/16 Makassar.

Obyek Penelitian : Oditur, Hakim Pengadilan Militer

Hari/Tanggal :

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Asas Equality Before The Law pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan Militer III/16 Makassar?
2. Bagaimana penanganan perkara pidana umum yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kolonel dan berpangkat Prada?

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama :

Pekerjaan :

1. Bagaimana pendapat bapak terkait mengenai Tap MPR no VII Tahun 2000 ?
2. Bagaimana pengaruh kepangkatan selaku prajurit TNI dalam memutus suatu perkara?
3. sejauhmana pengaruh Komandan satuan dalam perkara .?
4. bagaimana bapak menangani dan memutuskan suatu perkara pidana umum yang dilakukan oleh Prajurit.?
5. Bagaimana Rujukan Hakim memiliki perbedaan dalam memutuskan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit militer berpangkat kolonel dan yang berpangkat prada?
6. bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum.?

7. apakah seorang prajurit TNI yang telah terbukti melakukan tindak pidana umum akan serta merta dipecat dari kesatuan TNI.?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ruslan, lahir di Malaysia pada tanggal 26 Juni 1997, Anak Keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri Muh.Ramli dan Radiana.

Pendidikan formal penulis di SD Negeri 60 Tanete, Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tamat tahun 2009, melanjutkan pendidikan di Mts Negeri 410 Tanete tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MA Negeri Tanete dengan jurusan IPS dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Pengalaman organisasi penulis diantaranya : Pengurus Bidang Keorganisasian Kerukunan Keluarga Mahasiswa Bulukumba Periode 2018-2019, Pengurus Bidang Keorganisasian Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2018-2019, dan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Syariah dan Hukum Cabang Gowa Raya.